

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Ekonomi global yang belum pulih benar dari hantaman krisis global tahun 2008, dikejutkan kembali dengan terjadinya krisis Yunani yang berpotensi menjalar ke negara-negara dengan perekonomian lemah lainnya. Asal muasal krisis ini bermula dari adanya ketidakdisiplinan kebijakan fiskal dan hutang swasta dalam sepuluh tahun terakhir. Dalam masa pertumbuhan ekonomi, hutang swasta lah yang mengalami peningkatan sedangkan hutang pemerintah mengalami penurunan. Namun dalam masa krisis, hal yang terjadi justru sebaliknya dimana hutang swasta akan turun dan hutang pemerintah semakin meningkat. Hal ini dapat terjadi karena, pertama, dalam masa krisis penerimaan pemerintah dari pajak berkurang karena adanya penurunan kemampuan membayar pajak dari masyarakat. Kedua, pengeluaran pemerintah untuk membiayai tunjangan sosial akan semakin meningkat karena dalam masa krisis jumlah pengangguran dan kemiskinan akan meningkat. Ketiga, ketika swasta terutama sektor perbankan mengalami krisis hutang maka pemerintah harus mencari jalan keluar untuk menyelamatkan mereka.

Dalam menyelesaikan krisis keuangan Yunani ini, Uni Eropa sebagai salah satu institusi internasional telah menunjukkan perannya sebagai tempat untuk bertukar informasi dan kesempatan bernegosiasi, meningkatkan kemampuan aktor

... dan meningkatkan tingkat ketahanan aktor-aktor lainnya dalam menjalankan

komitmen yang telah disepakati, serta memperkuat harapan yang muncul tentang kesolidan dari kesepakatan internasional. Demikianlah peran sebuah institusi internasional sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert Keohane. Kerjasama internasional dalam kerangka institusi internasional mutlak diperlukan untuk menangani permasalahan yang berskala internasional. Terlebih lagi pada masa globalisasi seperti sekarang ini, dimana keterkaitan atau ketergantungan ekonomi antara satu negara dengan negara lainnya begitu besar, maka koordinasi negara-negara tersebut dalam membuat suatu kebijakan dalam menyelesaikan suatu krisis ekonomi menjadi sangat penting karena krisis di satu negara dapat memberikan dampak yang buruk pada perekonomian negara lainnya.

Krisis keuangan Yunani dipicu oleh adanya krisis hutang pemerintah Yunani yang terus meningkat. Pinjaman pemerintah Yunani ini terus membengkak sejak krisis finansial global pada tahun 2008. Hal ini disebabkan penerimaan pemerintah Yunani yang bersumber dari pajak menurun karena pada saat krisis ini kemampuan membayar pajak masyarakat dan perusahaan merosot. Sebaliknya, pengeluaran pemerintah semakin meningkat karena digunakan untuk membiayai tunjangan sosial bagi para pengangguran dan masyarakat miskin yang jumlahnya semakin bertambah.

Selain itu, kondisi ini semakin diperparah lagi dengan adanya rekayasa laporan keuangan pemerintah Yunani sejak tahun 2002 dengan bantuan dari salah satu bank AS, Goldman Sachs. Hal ini kemudian membuat peringkat dan surat hutang Yunani jatuh. Padahal surat hutang pemerintah Yunani tersebut banyak

ketidakpercayaan investor terhadap Yunani dan negara-negara PIIGS ( Portugal, Italy, Irlandia, Greece, Spain) lainnya untuk memberikan pinjaman atau menanamkan investasinya di negara-negara tersebut karena negara-negara tersebut dianggap memiliki kesamaan karakteristik, yaitu memiliki hutang yang besar dan defisit anggaran yang tinggi. Keadaan ini akan memicu krisis di negara-negara PIIGS lainnya karena mereka tidak mendapatkan pinjaman yang disebabkan para investor melihat negara-negara tersebut melalui kaca mata Yunani.

Kekhawatiran akan terjadinya efek domino dari krisis tersebut mendorong Uni Eropa untuk mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan krisis tersebut, ketika pemerintah Yunani secara terang memohon bantuan dari rekan-rekannya sesama anggota Uni Eropa untuk menyelesaikan krisis ini karena merasa sudah tidak sanggup lagi menyelesaikan masalah ini sendiri. Uni Eropa secara serius ingin benar-benar membantu menyelesaikan krisis ini. Hal ini diwujudkan dengan diselenggarakannya beberapa pertemuan penting guna mencari solusi yang tepat.

Pertemuan tingkat tinggi negara-negara anggota Uni Eropa yang diselenggarakan pada 25-26 Maret 2010 dan 11 April 2010 menegaskan peran penting institusi ini dalam mencari solusi yang tepat untuk menghadapi krisis Yunani tersebut. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut dihasilkan bahwa Uni Eropa bersama dengan IMF sepakat untuk memberikan dana talangan sebesar 110 miliar euro kepada Yunani untuk menyelesaikan krisis ekonominya. Namun, hal ini juga diikuti oleh beberapa persyaratan yang wajib dijalankan oleh Yunani di

mana Yunani diwajibkan untuk melakukan beberapa program penyesuaian ekonomi.

Dilema yang dihadapi pemerintah Yunani memang besar dalam usahanya untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara. Di satu sisi pemerintah harus menuruti program-program yang diajukan oleh Uni Eropa karena itu adalah satu-satunya cara guna mendapatkan bantuan keuangan. Namun di sisi lain, kebijakan untuk melakukan penghematan besar-besaran yang sedang dijalankan oleh pemerintah Yunani saat ini, mendapatkan protes keras dari sebagian besar rakyat Yunani. Mereka menganggap bahwa kebijakan ekonomi yang ada saat ini tidak berpihak pada rakyat karena pemerintah banyak melakukan pemotongan-pemotongan biaya pelayanan publik.

Kemudian untuk mengetahui perkembangan yang dialami Yunani pasca pemberian bantuan tersebut, Uni Eropa, IMF, dan Bank Sentral Eropa mengirimkan tim gabungan guna melakukan peninjauan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Yunani berhasil menjalankan program-program yang telah disepakati tersebut. Peninjauan ini dapat dilihat sebagai suatu upaya UE dalam mengawasi tingkat kepatuhan aktor lain, yang dalam hal ini adalah Yunani, dalam menjalankan komitmen yang telah disepakati. Pembentukan Fasilitas Stabilitas Finansial Eropa (*The European Financial Stability Facility*) yang dipicu oleh terjadinya krisis Yunani juga menjadi bukti bahwa Uni Eropa secara serius